

# Globalisasi dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

**Rima Ranintya Yusuf**  
**Politeknik STIA LAN Jakarta**

*Email: rimaranintya90@gmail.com ; rima.ranintya@stialan.ac.id*

## ABSTRACT

*NGO play an important role as government collaborators to provide decent public services to the community. This paper aims to find out what “NGO” is, and how globalization affects NGO accountability. This research using descriptive qualitative method. Data was collected through secondary data analysis and interviews with several NGO administrators. The results show that the definition and mechanism of NGO accountability differ depending on the form of the donor. Each donor has a different accountability mechanism, such as government donors, corporate donors, civil sector donors. This means that how the NGO accountability mechanism is carried out and the scope of its accountability is largely determined by the demands of the donors.*

**Keywords:** *NGO, accountability, participation, empowerment*

## ABSTRAK

LSM memainkan peran penting sebagai kolaborator pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat. Makalah ini mencoba untuk menyoroti apa itu “LSM”, dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap akuntabilitas LSM, terutama terhadap masyarakat dimana LSM tersebut beroperasi, dan kepada siapa LSM harus akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana mekanisme akuntabilitas LSM. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara kepada beberapa pengurus LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi serta mekanisme akuntabilitas LSM berbeda-beda tergantung pada bentuk donornya. Masing-masing donor memiliki mekanisme akuntabilitas yang berbeda, seperti donor pemerintah, donor korporat, donor sektor sipil. Artinya bahwa bagaimana mekanisme akuntabilitas LSM dijalankan beserta cakupan akuntabilitasnya sangat ditentukan oleh tuntutan dari donaturnya.

**Kata kunci:** LSM, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan

## PENDAHULUAN

LSM merupakan salah satu pilar dalam perwujudan *good governance*. Di berbagai negara, LSM memainkan peran penting sebagai kolaborator pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. LSM acapkali menjalankan fungsi untuk melakukan advokasi untuk mendapatkan keadilan dan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh negara dan pasar (Lassa dan Li, 2020:v). Di Indonesia, pertumbuhan LSM semakin cepat, demikian pula ragam isu yang diangkat semakin berkembang. Eksistensi dari LSM di Indonesia tidak lepas dari gelombang globalisasi. Dimana salah satu dimensi utama gelombang globalisasi adalah globalisasi melalui NGO internasional yang menanamkan pengaruhnya melalui berbagai program dan bantuan ke seluruh penjuru dunia.

Makalah ini mencoba untuk menyoroti apa itu “LSM”, dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap akuntabilitas LSM, terutama terhadap masyarakat dimana LSM tersebut beroperasi, dan kepada siapa LSM harus akuntabel. Hal ini menjadi menarik karena beberapa alasan, yang pertama adalah bahwa sebagian besar LSM di Indonesia bergantung pada donor asing. Implikasinya program yang dilakukan apakah memang merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat ataukah sekedar menjalankan agenda asing. Kedua adalah LSM merupakan lembaga yang ditengarai sebagai lembaga sukarela, sehingga jarang-jarang dipertanyakan akuntabilitasnya. Selama ini akuntabilitas LSM terlihat sebatas pada

akuntabilitas terhadap organisasi yang memberikan mereka dana, akuntabilitas yang terbatas pada *fund rising* nya.

## KAJIAN LITERATUR

### Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam perjalanannya ke Amerika Serikat tahun 1930-an, pemikir Prancis Alexis De Tocquville menemukan fenomena menarik terkait tumbuh-kembangnya asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary association*). Tocqueville kemudian secara intens mengamati asosiasi-asosiasi itu terkait dengan bagaimana peran mereka dalam demokratisasi dan penyampaian kritik publik terhadap pemangku jabatan publik. Terlihat ada satu relasi yang intens antara pemerintah (pembuat kebijakan) dengan objek kebijakan itu (warga/publik).

Risalah itu dikisahkan kembali oleh Dawam Rahardjo dalam pengantar untuk buku “Secangkir kopi Max havelar: LSM dan kebangkitan masyarakat” (1995). Rahardjo menyebut apa yang dimaksud oleh Tocquville itu adalah LSM seperti dalam pengertian sekarang ini. Artinya unsur dasar LSM adalah kesukarelaan masyarakat dalam mengorganisir diri menghadapi sosok “leviathan” (dalam pengertian Hobbes) Negara-pemerintahan. (Rahardjo, 2005: VIII). Dalam pengertian lain, LSM adalah soko guru civil society. LSM adalah pengejawantahan public of reason ala Immanuel Kant. LSM juga dikenal sebagai civil society organization (Suharko, 2007), mengingat kompleksitas pengertian civil society. Sementara Aditjondro (2005) menyebut ada differensiasi istilah yang tidak sederhana antara NGO (non government organization), LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan Ornop (organisasi non pemerintah), karena bagi Aditjondro, tiap asosiasi-asosiasi masyarakat itu juga dipengaruhi basis ideologis gerakan dan paradigmatiknya.

LSM sebagai salah satu aktor dalam *governance*, merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan. Berbagai bantuan pembangunan yang diperoleh dari pihak swasta maupun institusi luar negeri dipercayakan kepada LSM dalam pengelolaannya. Persentase peningkatan bantuan pembangunan yang diberikan oleh organisasi seperti PBB, Bank Dunia dan Uni Eropa diperkirakan disalurkan LSM lokal. Antara tahun 1990 dan 1994, persentase bantuan Uni Eropa disalurkan melalui LSM telah meningkat dari 47% ke 67%. (The Economist, 2000). Lebih dari 70 persen proyek disetujui dan disupport oleh Bank Dunia pada tahun 1999 dilaksanakan oleh LSM melalui beragam cara (World Bank, 2000 dalam Brown, David S, Christopher Brown and Desposato, 2007). LSM sebagai institusi yang dipercaya dalam menyalurkan bantuan pembangunan, dinilai lebih independen, memiliki kredibilitas yang tinggi, lebih responsif dan lebih flexible dibandingkan penyaluran bantuan melalui pemerintah yang dinilai sangat birokratis dan kurang responsif.

### Faktor Pendorong Tumbuhnya LSM

Pada masa Orde Baru, LSM dikenal sebagai garda depan dalam mengkritisi kebijakan Negara, terutama kebijakan Negara yang kurang memihak rakyat. Pada saat itu LSM adalah ladang pergerakan yang dapat diandalkan untuk memfasilitasi komunikasi-kritis antara masyarakat dengan pemerintah. Berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat terus dihujat melalui tulisan dan seruan-seruan reformasi dalam sebuah demonstrasi. Jika muncul sebuah pertanyaan, “siapa saja yang berperan dalam proses pembangunan demokratisasi dan mewujudkan *Good governance* di Indonesia selama ini?”. Maka salah satu jawabannya adalah LSM. Setelah reformasi dan setelah dikenal baiknya citra LSM di Indonesia, LSM mulai bermunculan di berbagai daerah. LSM bergerak kembali menjalankan fungsi kritis dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah. Peran serta LSM tidak diragukan lagi, setiap kali

pemerintah hendak menyusun sebuah kebijakan, pemerintah selalu melibatkan LSM dalam proses formulasi dan evaluasi sebuah kebijakan tersebut.

Kemunculan berbagai LSM tersebut sebenarnya berdampak positif bagi pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Namun, berdampak negatif apabila berbagai kemunculan LSM itu sendiri tidak diikuti dengan sistem manajerial yang transparan dan akuntabel. Setelah LSM bermunculan dan akses untuk membangun sebuah organisasi-kemasyarakatan itu dipermudah oleh Undang-undang, banyak LSM yang terkesan asal dibentuk tanpa memperhatikan tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Tidak jarang, banyak LSM di berbagai daerah mengalami kesulitan pendanaan atau kehilangan lembaga donor karena program mereka jalankan dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, kita pernah dikejutkan dengan berita akan ditutupnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akibat permasalahan finansial. Kondisi tersebut terjadi setelah beberapa lembaga donor menghentikan aliran dananya.

Gulung tikarnya berbagai LSM akibat kesulitan pendanaan tersebut membuat LSM berpikir ulang. LSM harus berubah dari lembaga *non-profit* menjadi lembaga *profit* demi keberlangsungan program-program yang akan dijelankannya. Akan tetapi banyak LSM yang menolak dikatakan sebagai lembaga pencari profit (*profit oriented organization*), walaupun LSM itu sendiri mengalami problem finansial untuk menjalankan agenda program. Perubahan dari *non-profit organization* menjadi *profit organization* itulah yang menuai kritikan tajam dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rustam Ibrahim pada tahun 2005 yang mengambil sampel 25 organisasi LSM dan OSMS, menyatakan bahwa 65% sumber pendanaan kegiatan LSM berasal dari bantuan luar negeri, sedangkan bantuan dari dalam negeri hanya mencapai 35% (Abidin, 2004). Melihat kenyataan tersebut, peran LSM yang semula independen dan memiliki keberpihakan ke masyarakat mulai dipertanyakan oleh publik. Evaluasi terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dalam LSM-pun semakin menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan diskusi-diskusi akademisi.

Hal senada juga dibenarkan oleh Benny Subianto, menurut pengamatan Benny Subianto yang ditulisnya dalam opini Kompas beberapa waktu lalu, LSM kini sudah banyak yang menjelma menjadi sebuah industri yang tidak lagi bersifat *non profit organization*, melainkan lebih mengarah pada *profit organization* bahkan *company organization*. Bahkan selama tiga hari, pada tanggal 16 April, 18 April dan 19 April 2007, harian Kompas menurunkan liputan mengenai "Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat". Hal ini bermula dari sebuah diskusi publik yang mengangkat tema "Perlunya Mengaudit Agenda dan Sumber Dana Asing terhadap LSM yang Merugikan Rakyat, Bangsa dan Negara" yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 April 2007. Dalam acara tersebut, akuntabilitas LSM digugat.

### **Akuntabilitas LSM**

Sejak tahun 1998, desakan atas akuntabilitas LSM mulai bergema di Indonesia, meskipun hanya beberapa yang kemudian muncul ke permukaan. Salah satu inisiatif yang muncul dilakukan oleh LP3ES pada tahun 2003. Inisiasi dilakukan dengan membangun asosiasi Kode Etik LSM di beberapa propinsi. Akan tetapi selanjutnya asosiasi ini tidak terdengar lagi sepak terjangnya. Desakan atas akuntabilitas LSM di daerah juga muncul dengan diinisiasi oleh KPMM di Sumatera Barat meskipun respon dari organisasi lainnya relative minim. Desakan atas akuntabilitas LSM ini berlanjut pada tahun 2005 melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja Akuntabilitas) yang mendorong akuntabilitas LSM beserta penguatan posisi LSM.

Anggapan yang muncul selama ini adalah LSM terkesan tertutup kepada publik dalam transparansi pengelolaan bantuan pendanaan, sehingga akuntabilitas LSM pun mulai dipertanyakan. LSM menyuarakan transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah, tapi LSM sendiri tidak berlaku transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk pada kelompok yang mendapat manfaat dari program-programnya. Menurut Herlina, dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Respon LSM Terhadap Tantangan Akuntabilitas: Pengalaman KPMM dan Komunitas LSM di Negara Lain”, setidaknya ada sejumlah faktor yang mendasari mengapa LSM cenderung tertutup mengenai isu akuntabilitas, faktor-faktor tersebut adalah (Herlina, 2009):

- a. LSM belum melihat urgensi tuntutan terhadap akuntabilitas keberadaan mereka,
- b. Keyakinan bahwa isu akuntabilitas adalah kepentingan pihak luar yang merasa terancam oleh gerakan LSM (pemerintah atau kekuatan politik lainnya),
- c. Pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pesanan lembaga donor atau kepentingan institusi global lainnya yang patut dicurigai,
- d. Penolakan terhadap segala upaya regulasi dan kooptasi dari pihak luar terhadap LSM,
- e. Kekhawatiran akan mengganggu independensi/kebebasan dan kemandirian LSM sehingga berdampak terhadap gerakan sosial yang diperjuangkan,
- f. Kemungkinan hanya semata ketidak-pedulian atau tidak mau terganggu kenyamanan perilaku atau budaya organisasi yang telah *institusionalized*.

Kondisi-kondisi ini yang mungkin membuat pembahasan terhadap akuntabilitas LSM kurang diminati sebagai topik penting oleh LSM. Atau bahkan sikap defensif mungkin menjadi respon yang didapatkan, karena pembicaraan tentang akuntabilitas LSM dianggap sebagai sebuah ancaman. Realitas tersebut menunjukkan bahwa LSM masih bersikap *defensif* dan *apriori* terhadap semua pertanyaan publik diatas. LSM curiga isu mengenai akuntabilitas LSM adalah akal-akalan pemerintah untuk membatasi ruang gerak LSM untuk bersikap kritis pada Negara. Namun disisi lain, sikap apriori LSM ini mendapat kecaman dari publik yang kurang puas terhadap tanggapan dari LSM tersebut. Teori konspirasi tertebar di dalam masyarakat bahwa beberapa LSM yang menerima bantuan dari luar negeri adalah tangan-tangan kepentingan Negara asing yang merugikan Negara. Beberapa tokoh masyarakat menganggap LSM hanya menjalankan fungsi *intervensionis* kebijakan dari pihak asing yang menyuplai pendanaan program kegiatan LSM.

Di kalangan LSM, pembahasan mengenai akuntabilitas dinilai problematik. Hal tersebut juga sebagaimana disampaikan oleh Greg Rooney, *Civil Society Program Advisor ACCES*, yang menyatakan bahwa sedikit sekali organisasi yang memiliki akuntabilitas terhadap konstituennya. Selain itu, tidak banyak organisasi nirlaba yang terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki prosedur operasional organisasinya, termasuk juga SOP dan AD/ART yang mengatur organisasi dan tata kerja organisasinya. Bahkan, terdapat beberapa LSM penerima hibah donor asing yang resisten dan tidak transparan dalam melaporkan keuangannya (Abidin dan Rukmini, 2004).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana mekanisme akuntabilitas LSM. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara kepada beberapa pengurus LSM. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian terkait dengan akuntabilitas LSM, kemudian mengumpulkan data-data sekunder yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Data sekunder didapatkan dari media, buku, laporan, jurnal dan literatur lainnya. Selanjutnya data-data hasil wawancara dan informasi dari

data sekunder tersebut dikelompokkan menurut unit-unit pertanyaan dan selanjutnya diorganisasikan dan diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi untuk kemudian disusun eksplanasi dan analisis untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme akuntabilitas LSM di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Globalisasi dan Akuntabilitas LSM

Salah satu dimensi gelombang utama globalisasi adalah masuknya bantuan luar negeri. Salah satu suntikan bantuan luar negeri ini dikucurkan melalui LSM. Dari sudut pandang, salah satu keunggulan LSM adalah LSM merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat maupun lembaga donor sebagai organisasi yang bersih dan independen. Pada tahun 2003, New York Times 21 Juli 2003 menulis editorial bahwa “LSM sekarang sudah menjadi bagian dari struktur kekuasaan juga”. Anderson berpendapat bahwa terdapat “risiko terhadap demokrasi” dari kegiatan LSM internasional. Risiko ini muncul karena ada perbedaan antara LSM yang aktif secara domestic dalam masyarakat yang demokratis dengan LSM yang aktif di arena internasional. Perbedaan yang dimaksudkan adalah bahwa sementara LSM dapat melakukan lobi-lobi domestiknya dalam struktur demokratis, namun “dalam dunia internasional yang tidak demokratis” segala sesuatunya berbeda sebab “system internasional tidak memiliki legitimasi demokratis.” (Jordan dan Tuijl, 2009).

Di Indonesia harus diakui belum banyak kajian yang mendalam mengenai dampak globalisasi terhadap akuntabilitas LSM maupun kinerja LSM dibandingkan ketika LSM tersebut belum tersentuh globalisasi. L. David Brown dan Jagadananda dalam sebuah tulisan terbitan Harvard University juga menambahkan bahwa akuntabilitas seringkali menjadi sebuah pertanyaan besar yang sulit dijawab oleh LSM. LSM terkadang bersikap *apriori* dan cenderung defensif jika bertemu dengan pertanyaan tersebut. Tulisan yang disampaikan oleh L. David Brown dan Lusi Herlina tersebut didukung oleh data factual yang terjadi di Indonesia. Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, organisasi kemasyarakatan dalam bentuk LSM berkembang pesat di Indonesia. Berbagai LSM bermunculan tiap tahun di berbagai daerah. Realitas sosial-politik tersebut terjadi karena adanya terbentuknya konstiusi yang mendukung bagi berdirinya organisasi di dalam masyarakat. Selain itu, peran kritis yang dijalankan oleh LSM pada masa pemerintahan Orde Baru mendapat citra positif dari masyarakat. Oleh karena itu, pendirian LSM dipermudah dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Akan tetapi citra positif tersebut tidak berlangsung lama, beberapa anggota masyarakat justru bersikap skeptis terhadap pendirian LSM yang terlampaui banyak dan tanpa diimbangi sistem manajerial yang jelas dan transparan. Banyak LSM yang gulung tikar akibat bermasalah secara financial. Namun bagi masyarakat dan Negara, permasalahan yang lebih besar terdapat ketika LSM menerima bantuan donor dari luar negeri yang mempunyai kepentingan negatif terhadap Negara. Menurut Fakhri, secara ideal LSM adalah organisasi yang muncul dari ranah sipil yang tentunya memperjuangkan hak-hak sipil sebagai agen alternatif pembangunan, tetapi pada kenyataannya agen pembangunan alternatif ini tidak bebas kepentingan (Fakhri, 2000).

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan dkk (2009), dana memiliki peranan yang penting sekaligus menentukan hidup mati LSM, seperti untuk menunjang operasional kegiatan, gaji pegawai dan kebutuhan lainnya. Oleh karenanya sebagian LSM menempatkan pendanaan menjadi bagian utama dalam menjamin eksistensi lembaga. Dana menjadi penentu keberlanjutan eksistensi LSM, sehingga bagi “pemiliknya” persoalan dana ini

menjadi salah satu bagian utama yang terus diusahakan sumber serta keberlanjutannya. LSM yang diteliti oleh Dharmawan dikategorikan menjadi 2, yaitu LKTS dan LPS. Kedua model pengelolaan tersebut mempunyai sistem sumber pendanaan yang berbeda. LKTS lebih banyak menggunakan dana asing sebanyak 88%, sedangkan LPS sama sekali tidak menggunakan dana asing dan hanya mengandalkan dana lokal sebanyak 96%. Berikut merupakan tabel perbandingannya:

**Tabel. 1**  
**Perbandingan Sumber Dana LKTS dan LPS (Persentase)**

No	Nama LSM	Dana Asing (%)	Dana Lokal (%)	Dana Lainnya (%)
1.	LKTS	88	14	1
2.	LPS	0	96	4

*Sumber: Assa'di, Dharmawan dan Adiwibowo, 2009: 240*

Dengan melihat rangkuman data hasil penelitian di atas, maka masyarakat patut mempertanyakan akuntabilitas LSM, karena independensi pendanaan mereka mayoritas disuplai oleh dana asing. Melihat hal tersebut LSM cenderung bersikap apriori dan defensif terhadap isu akuntabilitas. Walaupun LSM bersikap defensif, namun idealnya LSM harus bersikap transparan kepada berbagai lembaga donor dan pihak yang dijadikan sasaran agenda program mereka.

Sebagian kritik tentang international dan transnational NGOs hanya sekedar pada akuntabilitas sebagai sebuah pengetahuan atau kepercayaan atas suatu isu tertentu versus “social trade-offs sense”. Sebaliknya, kritik utama atas NGO adalah tentang legitimasi peran mereka dalam tata pemerintahan global (Anderson, 2009). Menjadi key point dalam diskusi ini adalah bagaimana akuntabilitas NGO itu berjalan dalam koridor globalisasi. Peran yang seperti apakah yang dimainkan dalam tata pemerintahan global.

### **Akuntabilitas LSM dalam Tata Pemerintahan Global**

Akhir-akhir ini, akuntabilitas LSM Internasional telah menarik banyak minat akademisi dan praktisi pembangunan (Jagadananda and Brown 2005; Jordan 2005; Blagescu et al. 2005; Mawdsley et al. 2005) (dalam Cavill and Sohail, 2007). Demikian pula, sebagian besar diskusi mengenai LSM saat ini lebih banyak mengangkat isu mengenai penguatan akuntabilitas LSM, otonomi dan efektivitas organisasi (Fowler, 1997, 2000, Corten, 1990; Lewis dan Wallace, 2000) (dalam Kamat, 2004). Tidak hadirnya mekanisme akuntabilitas yang efektif di tingkat global telah menghasilkan keterputusan yang menguatirkan dalam hubungan antara organisasi global dan individual yang mereka pengaruhi (Kovach dalam Jordan dan Tuijl, 2009).

Pengertian tentang akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari konsep kontrak wakil-mewakikan yang mengikat pejabat yang dipilih melalui mekanisme apapun (misalkan Pemilihan Umum) dengan orang yang memilih. Hal ini terjadi seolah terdapat pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kelompok lain yang diwakilinya. Namun mekanisme delegasi kekuasaan ini tidak terjadi pada LSM. Sebagian besar LSM membentuk dan menunjuk dirinya sendiri sehingga ia tidak terikat pertanggungjawaban resmi kepada masyarakat, sebagaimana halnya terjadi pada pejabat yang mendapatkan mandat langsung dari masyarakat melalui Pemilu.

Geopolitik historis dan kontemporer menyebabkan bantuan pemerintah kepada pemerintah tidak sampai kepada Negara-negara yang paling membutuhkan. Harmer dan Cotterrell mengungkapkan bahwa bantuan-bantuan darurat kemanusiaan seringkali didorong oleh kepentingan-kepentingan politis. Pengikatan bantuan juga mencerminkan motivasi-motivasi

lain seperti nilai-nilai keagamaan. (Jordan dan Tujl, 2006: 179). Banyak pelaku di dalam komunitas LSM yang tidak bertanggungjawab dan bersikap tidak etis. Dalam bukunya yang berjudul *Striking a Balance*, Alan Fowler memanfaatkan sekumpulan akronim dari LSM untuk mengidentifikasi berbagai LSM “pura-pura” seperti BRINGO (Briefcase NGO, atau LSM tas); GONGO (Government-owned NGO, atau LSM milik pemerintah), MANGO (Mafia NGO, atau LSM mafia); dan PANGO (Party NGO, atau LSM Partai). (Ibrahim (ed.), 2010 : 41).

Dalam konteks *global public policy*, terkait dengan aktivitas LSM yang banyak berurusan dengan lembaga donor internasional, siapa yang berhak meminta siapa untuk akuntabel, dan bagaimana ia memfasilitasi dan menunjukkan akuntabilitasnya? Beberapa literature menggunakan teori “principal-agent” untuk menganalisis persoalan akuntabilitas. Teori ini menunjukkan hubungan bahwa principal mendelegasikan beberapa aktivitas tertentu kepada agen. Dalam konteks INGO, principal (pemerintah, klien, donor dan stake holder lainnya) mendapatkan pelayanan yang aman dari agen (INGO) (Cavill and Sohail, 2007). Maka INGO harus akuntabel terhadap principal nya. Lembaga-lembaga bantuan pemerintah yang bertindak sebagai donor, akuntabel terhadap Negara yang mereka layani. Lembaga-lembaga bantuan bilateral mempunyai strategi dan prioritas yang mempunyai cakupan sangat luas yang dikembangkan oleh para politisi di pemerintah dan harus melapor kembali, seringkali kepada berbagai bagian dari pemerintah itu. Donor-donor dan pemberi pinjaman antar pemerintah, seperti Bank Dunia dan IMF, pertama-tama akuntabel kepada pemerintah-pemerintah yang membiayainya. Akibatnya, Negara-negara Eropa dan Amerika Utara mempunyai pengaruh yang paling kuat atas lembaga-lembaga tersebut. Bentuk-bentuk akuntabilitas ini bisa bertentangan dengan konsep yang lebih luas tentang akuntabilitas demokratis, dimana para penyandang dana akan tanggap terhadap mereka yang membutuhkan (Jordan dan Tujl, 2006: 179).

Bentuk dari akuntabilitas LSM sangat dipengaruhi oleh tipologi governance dan tuntutan akuntabilitas dari donornya. LSM yang mendapatkan donor dari International NGO tentu saja harus memenuhi tuntutan akuntabilitas sebagaimana dipersyaratkan oleh lembaga donornya melalui laporan kegiatan, laporan keuangan, sampai audit atas dampak kebermanfaatannya atas program yang dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitasnya pun beragam. Jenis dana yang diberikan apakah merupakan hibah atau hutang negara, serta siapa lembaga donornya akan berpengaruh terhadap tuntutan akuntabilitas yang harus disampaikan. Selain melalui laporan yang disampaikan, lembaga donor dapat melakukan audit maupun evaluasi terhadap kinerja dari LSM yang didanai secara langsung maupun dengan menggunakan jasa konsultan profesional. Lembaga donor tersebut yang selanjutnya akan melaporkan kepada publik dalam bentuk laporan yang dipublikasikan dalam website maupun media sosial lainnya. Apabila LSM tersebut mendapatkan pendanaan dari pemerintah, maka LSM wajib melaporkan kepada pemerintah dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, sebagian lainnya akan melaporkan kepada masyarakat sebagai konstituennya atas kerja-kerja yang dilakukannya. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk agenda kegiatan, maupun laporan kegiatan dan laporan keuangan yang disusun secara berkala dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula LSM yang mendapatkan donor dari masyarakat secara partisipatif. Maka bentuk akuntabilitasnya dapat berupa laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan langsung kepada donatur serta mekanisme evaluasi lainnya seperti dalam bulletin, website, booklet dan media lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas LSM merupakan sebuah tuntutan yang harus dijalankan. Sedangkan mekanisme dan seberapa luas cakupan akuntabilitas sangat bergantung pada ketentuan yang diberikan oleh donaturnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sebagian besar LSM di Indonesia masih sangat menggantungkan anggarannya dari lembaga donor asing dan LSM internasional (Lassa dan Li, 2020: 2). Dan sebagian lagi mendapatkan donor dari masyarakat yang dikumpulkan secara partisipatif. Dan mekanisme akuntabilitas menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi maupun penyalahgunaan uang dan kekuasaan. Berbagai lembaga, termasuk LSM memiliki bentuk *governance* yang berbeda-beda. Bentuk *governance* tersebut turut serta mempengaruhi bentuk akuntabilitas yang berbeda pula. Definisi nilai akuntabilitas LSM ini terlihat berbeda-beda tergantung pada bentuk donornya. Masing-masing donor memiliki mekanisme akuntabilitas yang berbeda, seperti donor pemerintah, donor korporat, donor sektor sipil. Artinya bahwa bagaimana mekanisme akuntabilitas LSM dijalankan beserta cakupan akuntabilitasnya sangat ditentukan oleh tuntutan dari donaturnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kenneth. 2009. Review: What NGO Accountability Means: And Does Not Mean. *The American Journal of International Law*. Vol. 103, No. 1 (Jan), pp. 170-178. Published by: American Society of International Law. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20456745>.
- Brown, David S., Brown, J. Christopher dan Desposato, Scott W. 2007. Promoting and Preventing Political Change through Internationally Funded NGO Activity. *Latin American Research Review*. Vol. 42, No. 1, pp. 126-138. Published by: [The Latin American Studies Association](http://www.jstor.org/stable/4499356). Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4499356>
- Budi, Hardiman F. 2010. "Menyelamatkan Ruang Publik" dalam Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius.
- Cavill, Sue and Sohail, M. 2007. Increasing Strategic Accountability: A Framework for International NGOs. *Development in Practice*. Vol. 17, No. 2 (Apr), pp. 231-248. Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25548202>
- Fakih, Mansour. 2000. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2006. "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi". INSIST Press.
- Hamid Abidin, 2004. Transparansi dan Akuntabilitas LSM: Problem dan Ikhtiar, dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini (ed), *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa, 2004.
- Herry-Priyono, B. 2010. "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas" dalam Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius
- Husain Assa'di, Arya Hadi Dharmawan dan Soeryo Adiwibowo. Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor. *Jurnal Sodality: Jurnal Trans Disiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Hal 240., Vol. 03, No. 02 Tahun 2009. Hal 231-158 ISSN: 1978-4333
- Ibrahim, Rustam (ed.). 2010. Kode Etik LSM dan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil: Pengalaman Beberapa Negara.
- Jordan, Lisa dan Tuijl. Peter Van. 2009. Akuntabilitas LSM : Politik, Prinsip dan Inovasi. Jakarta ; LP3ES. Jakarta : Kelompok Kerja untuk Akuntabilitas OMS.
- Kamat, Sangeeta. 2004. The Privatization of Public Interest: Theorizing NGO Discourse in a Neoliberal Era. *Review of International Political Economy*. Vol. 11, No. 1 (Feb), pp. 155-

---

176Published by: Taylor & Francis, Ltd.. Stable URL:  
<http://www.jstor.org/stable/4177492>.

Lassa, Jonatan dan Domingus Elcid Li. 2020. Jaringan LSM dan Masa Depan Keberlanjutan LSM di Indonesia. Jakarta: KSI Indonesia. Disusun untuk Department of Foreign Affairs and Trade.

Lusi Herlina. 2009. Respon LSM Terhadap Tantangan Akuntabilitas : Pengalaman KPMM dan Komunitas LSM di Negara Lain. Makalah yang disampaikan pada Semiloka Perluasan Isu Transparansi dan Akuntabilitas LSM/Ornop ke tingkat Sumatera yang diadakan di Padang tanggal 2-4 Juni 2009.

Rahardjo, Dawam M. 1995. "Pendahuluan; Kelas menengah, Masyarakat Sipil dan LSM" dalam Saidi, Zaim. Secangkir Kopi Max Havelaar; LSM dan Kebangkitan Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.